

## Anteseden belanja daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah

Erlina Sulistiani<sup>1</sup>, Arya Samudra Mahardhika<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa, Kebumen.

<sup>1</sup>Email: erlinasulistya8@gmail.com

<sup>2</sup>Email: mahardhika1988@yahoo.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan bantuan *SPSS 23 For Windows*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci:** Pendapatan asli daerah; dana perimbangan; jumlah penduduk; belanja daerah

### *The antecedent of regional/district expenditures in central java province*

#### *Abstract*

*This study aimed to analyze the effect of Regional Original Revenue, Balancing Fund and Total Population on District/City Regional Expenditure in Central Java Province. This study used secondary data in the form of Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget Reports from 2016 to 2018. Hypothesis testing in this study uses Multiple Linear Regression with the help of SPSS 23 For Windows. The result of the research partially showed that the Original Regional Revenue, Balance Fund and Population have a significant effect on Regional Expenditure in Central Java Province.*

**Keywords:** *Regional original revenue; balance funds; population amounts; regional expenditures*

---

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan sistem otonomi daerah atau desentralisasi yang mirip negara serikat atau federal. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD terdiri atas beberapa komponen yaitu: pendapatan daerah dan belanja daerah.

Menurut Asari dan Suardana (2018:879) Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data Belanja Daerah Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018 terdapat 11 Kabupaten/Kota yang mengalami fluktuatif, 19 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan setiap tahun dan 5 Kabupaten/Kota mengalami penurunan setiap tahun. Data dari belanja daerah menunjukkan kurang mandiri pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kenyataan yang terjadi adalah dana transfer justru dijadikan sebagai sumber penerimaan utama dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah yang tidak sebanding dengan nilai Pendapatan Asli Daerah yang mampu di peroleh oleh setiap daerah.

Penerimaan daerah dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jika pendapatan asli meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dana perimbangan menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah satu dengan yang lain, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Selanjutnya jumlah penduduk juga mempengaruhi belanja daerah daerah karena penduduk merupakan penikmat layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Penelitian ini didasari atas ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2011) yang menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Menurut Devita *et al.* (2014) penambahan jumlah penduduk dapat mengurangi belanja langsung karena alokasi belanja langsung relative berimbang setiap daerah sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk dapat mengurangi belanja.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

## METODE

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari *website* [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) dan dari situs Badan Pusat Statistik [www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id) Sumber data yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran tahun 2016-2018 dan data jumlah penduduk tahun 2016-2018.

Objek penelitian ini adalah belanja daerah. Subjek penelitian adalah laporan realisasi anggaran dari situs dirjen perimbangan keuangan pemerintah daerah, dan data jumlah penduduk dari situs badan pusat statistika.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 dalam kurun waktu 3 tahun sehingga berjumlah 105.

Sampel merupakan bagian yang menjadi objek sesungguhnya dari suatu penelitian (Siregar, 2019). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh sehingga keseluruhan populasi dalam penelitian digunakan sebagai subyek penelitian.

### Menguji koefisiensi determinasi ganda ( $R^2$ )

Analisis ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan, model dalam menerangkan variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2018: 97).

### Uji f

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel variabel dependen atau terikat.

### Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Irhanni, 2017: 50). Pengambilan keputusan berdasarkan apabila nilai *p-value* < taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov* pada program komputer SPSS 23.0 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. One-sample kolmogorof-smirnov test

		Unstandardized residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03528749
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.080
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.064 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (*Sig.*) > 0,05 yaitu sebesar 0,064 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

### Uji multikolinearitas

Hasil pengujian dari multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil pengujian multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)			
PAD	.283	.740	1.352
DP	.448	.118	8.469
JP	.362	.114	8.769

a. Dependent Variable: BD

Berdasarkan tabel 2 tersebut, terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF

kurang dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

### Uji autokorelasi

Uji ini dilakukan dengan metode Run-Test. Hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil pengujian runs-test

Runs Test	
	Unstandardized residual
Test Value <sup>a</sup>	-.00169
Cases < Test Value	52
Cases >= Test Value	53
Total Cases	105
Number of Runs	49
Z	-.882
Asymp. Sig. (2-tailed)	.378

a. Median

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,378 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa uji *Runs-Test* tidak terjadi gejala atau masalah autokorelasi.

### Uji heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan dengan metode uji glejser, hasil dari pengujian sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian *Glejser*

Model	Coefficients <sup>a</sup>			
	Unstandardized		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-.021	.498	-.043	.966
1 PAD	.016	.016	1.004	.318
DP	-.006	.051	-.120	.905
JP	-.011	.027	-.397	.692

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk masing-masing variabel independen lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Uji hipotesis

Analisis regresi linier berganda

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dari analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients			Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	2.343	.730	3.209	.002
PAD	.242	.023	10.304	.000
DP	.492	.075	6.525	.000
JP	.206	.040	5.187	.000

a. Dependent Variable: BD

Berdasarkan tabel 5 hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa tiga variabel yang dimasukkan dalam model signifikan mempengaruhi Belanja Daerah. Disimpulkan bahwa uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

### Hubungan pendapatan asli daerah dan belanja daerah

Hasil uji t pada tabel IV.7 menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan koefisien sebesar 0,242. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{A1}$  diterima atau  $H_{01}$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan yang positif antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

#### Hubungan dana perimbangan dan belanja daerah

Hasil uji t pada tabel IV.7 menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan koefisien sebesar 0,492. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{A1}$  diterima atau  $H_{01}$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan yang positif antara Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.

#### Hubungan antara jumlah penduduk dan belanja daerah

Hasil uji t pada tabel IV.7 menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan koefisien sebesar 0,206. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{A1}$  diterima atau  $H_{01}$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan yang positif antara Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah.

#### Uji f

Hasil pengujian Simultan sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil pengujian simultan ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.174	3	.725	565.244	.000 <sup>b</sup>
Residual	.130	101	.001		
Total	2.304	104			

a. Dependent Variable: BD

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 565,244 dengan tingkat signifikansinya sebesar  $0,000 \leq 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa,  $H_{A3}$  diterima dan  $H_{03}$  ditolak, artinya secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

#### Pengujian koefisien determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 7. Pengujian koefisien determinasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.971 <sup>a</sup>	.944	.942	.03581

a. Predictors: (Constant), JP, PAD, DP

b. Dependent Variable: BD

Berdasarkan tabel IV.9 hasil tampilan *output model summary* menunjukkan bahwa besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,942, hal ini berarti bahwa 94,2% yang menunjukkan bahwa Belanja Daerah dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 5,8% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

#### Pengaruh pendapatan asli terhadap belanja daerah

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil analisis dari uji t pada variabel Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan diperoleh arah hubungan yang positif antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin berpengaruh pula terhadap Belanja Daerah, karena kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

---

---

suatu daerah sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devita et al (2014) di Provinsi Jambi dimana Pendapatan Asli Daerah berbanding lurus dengan Belanja Daerah, sehingga ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga mengalami peningkatan ketika Dana Perimbangan tidak mengalami perubahan atau dalam kondisi tetap. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hadi sasana (2011) yang membuktikan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

#### **Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah**

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil analisis uji t pada variabel Dana Perimbangan, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Dana Perimbangan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, artinya Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan diperoleh arah hubungan yang positif antara variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi Dana Perimbangan maka semakin berpengaruh terhadap besarnya alokasi dana Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mampu mencapai tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah terutama dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya yang semakin baik pula.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asari dan Suardana (2018) di Provinsi Bali, dimana Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Belanja Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang bersifat bantuan atau dapat dikatakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengawasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

#### **Pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah**

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil analisis uji t pada variabel Jumlah penduduk, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Jumlah Penduduk sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, artinya Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah diperoleh arah hubungan yang positif antara variabel Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan penduduk maka semakin berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran Belanja Daerah karena penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya fasilitas yang baik untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sasana (2011) di Provinsi Jawa Barat, dimana Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan dengan arah Belanja Daerah. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devita et al (2014) yang membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai Sig.  $0,000 < 0,05$  dengan koefisien sebesar 0,242 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap Belanja Daerah.

Variabel Dana Perimbangan ( $X_2$ ) memiliki Sig. Sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai koefisien sebesar 0,492 menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap Belanja Daerah.

Variabel Jumlah Penduduk ( $X_3$ ) memiliki Sig.  $0,000 < 0,05$  dengan koefisien sebesar 0,206 menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap Belanja Daerah.

---



---

Hasil Uji F (Simultan) juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena memiliki nilai Sig  $0,000 < 0,05$ .

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linier Berganda diperoleh hasil uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai sebesar 0,942 artinya 94,2% variabel Belanja Daerah dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk. Sedangkan sisanya sebesar 5,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini membuktikan bahwa variabel Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah belum bisa sepenuhnya dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk karena nilainya masih dibawah 100%. Dengan kata lain Belanja Daerah terbukti secara empiris dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asari, N. M. A., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1): 877-904.
- Adventino, Y. E. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2): 63-70.
- Didu, S & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi Untirta*, 6(1): 102-117.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D.R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Fakultas Ekonomi & Bisnis Unmul*, 14(1): 44-52.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Cetakan 9. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gorahe, I. A. M., Masinambow, V., & Engka, D. Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 1-12
- Herlina, E. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah serta Dampaknya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau. *Journal Of Innovation in Business & Economics*, 4(1), 25-44.
- Irhamni. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasi, Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2): 203-214.
- Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman*, 18(1): 14-24.
- Sanusi, A & Yusuf, M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kajian Publik UNPAB*, 3(1): 50-56.

- 
- 
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1): 46-58.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan 6. CV ALFABETA. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintah Desa. 1 Desember 1979. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3153. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah. 7 Mei 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 20 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Daerah. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Wulandari, P. A & Iryanie, E. 2018. Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Cetakan 1. CV BUDI UTAMA. Yogyakarta
- Hudayah, S. (2012). Pengetahuan Anggaran, Efektivitas Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Hubungannya dengan Kepuasan Atas Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pengetahuan Anggaran, Efektivitas Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Hubungannya dengan Kepuasan. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(1).